

STRATEGI PENERAPAN SERTIFIKASI EKOLABEL PADA PERUM PERHUTANI

Tina Hesti Wahyuni¹, Purwanto², Haryo Santoso³

¹Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

²Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

³Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

email: tinahesti.w@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan sertifikasi ekolabel merupakan suatu pemberian label yang dilakukan sukarela karena dorongan pasar dengan melibatkan berbagai pihak yang luas. Pada penerapan sertifikasi tersebut Perum Perhutani menerapkan sistem kelola yang mengambil prinsip berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam penerapan sertifikasi dengan memperhatikan aspek internal maupun eksternal telah memberikan suatu dampak pengelolaan hutan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelola seperti apa yang dilakukan perhutani, menganalisis komitmen manajemen dalam penerapan sertifikasi, kemudian mengambil prioritas strategi yang dapat dilakukan dalam penerapan sertifikasi ekolabel. metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi di lapangan, serta melakukan wawancara mendalam kepada informan dan dengan kuesioner kepada responden. Analisis dilakukan oleh deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tentang aspek kelola perhutani terdiri dari kelola lingkungan, kelola sosial dan kelola produksi/ekonomi, dan komitmen manajemen yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,94 adalah baik. Strategi yang menjadi prioritas adalah strategi *egresif* yang menguntungkan bagi perusahaan. Akan tetapi juga dibutuhkan suatu upaya yang dapat meningkatkan perkembangan penerapan sertifikasi hutan di Perum Perhutani dengan memperhatikan kondisi internal dari karyawan dan kondisi eksternal yaitu masyarakat.

Kata Kunci: Sertifikasi Ekolabel, Perum Perhutani, Strategi penerapan

PENDAHULUAN

Tuntutan pasar dunia terhadap barang yang ramah lingkungan, maka harus digunakan suatu sistem labeling dan sertifikasi yang mengindikasikan produk/jasa yang dihasilkan merupakan produk/jasa yang ramah lingkungan dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ekolabeling merupakan suatu instrument yang dapat mencegah laju kerusakan hutan melalui pengendalian sistem pasar global, dimana

pasar global hanya akan menerima produk hasil hutan yang bersertifikat ekolabel.

Ekolabel menurut artikulasi kata berasal dari kata *eco* yang berarti lingkungan hidup dan dari kata *label* yang berarti suatu penanda untuk membedakan dengan produk lain (Martono, 2012). Berdasar pada Permen Lingkungan Hidup no. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa ekolabel merupakan suatu label lingkungan yang merupakan pernyataan atau tanda yang menunjukkan

keunggulan suatu produk dalam memberikan manfaat terhadap perlindungan lingkungan. Menurut Salim dan Wibowo (2000) dalam Salam (2014) menyebutkan bahwa untuk produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) yang memiliki ekolabel menunjukkan bahwa barang tersebut berasal dari SDA yang dikelola secara lestari.

Sertifikasi hutan merupakan suatu alat untuk informasi dan instrumen berbasis pasar (Upton dan Bass, 1995; Rametsteiner dan Simula, 2003). Dengan penerapan sertifikasi hutan maka diperoleh keuntungan yang menginformasikan bahwa suatu unit manajemen hutan ataupun industrinya tidak merusak hutan, sehingga diharapkan hal tersebut dapat memberikan keuntungan komparatif *vis a vis* non-partisipan (Gunningham dan Sinclair, 2002; Rametsteiner dan Simula, 2003). Sertifikasi hutan merupakan instrumen yang dapat menjadi pendukung upaya konservasi sekaligus juga sebagai bukti keberpihakan unit manajemen hutan terhadap masyarakat setempat dengan adat yang dimilikinya.

Untuk dapat mengelola hutan secara lestari maka Perum Perhutani telah menjadi salah satu pelaku dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan yang seimbang dengan melaksanakan sertifikasi pada unit manajemennya. Pada tahun 1998 KPH Kebonharjo, Cepu, Kendal, Lawu dan KPH Madiun memperoleh sertifikat ekolabel pengelolaan hutan lestari. Akan tetapi karena terjadinya perubahan situasi politik, ekonomi dan sosial di Indonesia pada 1998-2000 dengan adanya penjarahan hutan yang menyebabkan benturan dengan masyarakat sekitar hutan serta tidak dilakukannya CAR (*Correction Action Request*) maka sertifikat ekolabel pengelolaan hutan lestari oleh Smart Wood dicabut pada 2001. Oleh karena itu

perlu dilakukan suatu analisis dan identifikasi terhadap penerapan sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani. Pada tahun ini secara keseluruhan unit manajemen hutan milik Perum Perhutani yang telah mendapat sertifikat pengelolaan hutan secara lestari ada 7 (tujuh) KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yaitu : Pada tahun 2011, Perum Perhutani mendapatkan Sertifikat FSC untuk KPH Kendal dan KPH Kebonharjo; Pada tahun 2012, Perum Perhutani mendapatkan Sertifikat FSC untuk KPH Cepu, KPH Randublatung dan KPH Ciamis ; Pada tahun 2013, Perum Perhutani mendapatkan Sertifikat FSC untuk KPH Madiun dan KPH Banyuwangi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kelola yang dilakukan perhutani, menganalisis komitmen manajemen dalam penerapan sertifikasi, kemudian mengambil prioritas strategi yang dapat dilakukan dalam penerapan sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Perum Perhutani dengan studi kasus di KPH Cepu dan Industri kayu I sub Cepu yang terletak di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dari perhitungan dengan rumus slovin dan jumlah karyawan total dari KPH Cepu 472 orang diperoleh responden 82 karyawan dan Industri Kayu I Sub Cepu 318 orang diperoleh responden 75 karyawan maka diperoleh jumlah responden total adalah 156 orang untuk mengetahui penilaian kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi penerapan sertifikasi.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data primer tentang komitmen manajemen dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan mengolah hasil

kuesioner menggunakan skala likert (Sugiyono, 2004). Penentuan kriteria penilaian dari jawaban responden maka sesuai dengan :

1. Sangat Setuju (SS) : diberi bobot 5
2. Setuju (S) : diberi bobot 4
3. Ragu-Ragu (N) : diberi bobot 3
4. Tidak Setuju (TS) : diberi bobot 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi bobot 1

Dari hasil perhitungan kesimpulan bahwa :

4,20 – 5,00	= Sangat Baik (SB)
3,40 – 4,19	= Baik (B)
2,60 – 3,39	= Kurang Baik (KB)
1,80 – 2,59	= Tidak Baik (TB)
1,00–1,79	= Sangat Tidak Baik (STB)

Data primer dan sekunder tentang aspek kelola dalam penerapan sertifikasi ecolabel Perum Perhutani dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Miles dan Huberman dimana pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan secara interaktif, melalui proses: *data collection, data reduction, data display dan verification/conclusion.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Hutan di Perum Perhutani

Dalam kegiatan pengelolaannya, Perum Perhutani memiliki visi *Menjadi Pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*, dan misi : Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestri, serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan

perusahaan secara berkelanjutan ; Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, professional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan ; Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional. Dari visi dan misi tersebut maka terdapat tiga aspek kelola yang juga menjadi dasar untuk melaksanakan sertifikasi ecolabel berupa sertifikasi PHL. Aspek kelola tersebut adalah aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek produksi.

Dalam Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengelolaan Hutan Perum Perhutani KPH Cepu bahwa upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi kegiatan : Pemantauan laju erosi; kesuburan tanah; fluktuasi debit; curah hujan; laju sedimentasi; kandungan padatan tersuspensi dalam badan air (TSS); kualitas Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) yang berupa perlindungan tata air (sempadan sungai, mata air dan sempadan jurang); kualitas kimia air (pH, BOD, COD, DO, Ammonia, Nitrit, Nitrat, Deterjen, Phospat, Organoklorin, Organophosphat) dan melakukan pemantauan jumlah dan jenis penggunaan bahan kimia; Pemantauan struktur dan keanekaragaman vegetasi; Pemantauan distribusi penyebaran dan keanekaragaman satwa; Pemantauan viabilitas target dan status ancaman keberadaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT); Pemantauan peningkatan perekonomian desa dengan mengetahui tingkat pendapatan masyarakat yang terlibat

dalam pengelolaan hutan, pendapatan yang diperoleh MDH dari pemberian akses pemanfaatan SDH, keefektifan penggunaan dana sharing dari tebangan ; Pemantauan keanggotaan dan kategori LMDH serta kerjasama yang dilakukan LMDH dengan pihak ke tiga; Pemantauan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja local dan penerapan K3 ; Pemantauan terhadap kerawanan hutan (gangguan keamanan hutan) dari kasus tennurial, pencurian, kebakaran, penggembalaan liar dan perburuan; Pemantauan terhadap tingkat pendidikan masyarakat desa dan jumlah buta aksara ; Pemantauan terhadap jumlah sampah dan pengelolaannya serta penyakit yang terjangkit di sekitar masyarakat; Pemantauan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan yang dilakukan KPH Cepu.

Kelola Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan

Kelola lingkungan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperbaiki atau

mempertahankan kondisi lingkungan sehingga dapat meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan yang dilakukan perusahaan, khususnya terhadap spesies dan ekosistemnya. Dari kesemua kriteria aspek lingkungan yang disebutkan tersebut dilakukan evaluasi kegiatan yang menekankan pada dampak yang ditimbulkan pada komponen lingkungan berupa laju erosi yang terjadi, kesuburan tanah berupa kandungan kimia tanah, debit air sungai, kualitas air sungai, laju sedimentasi, keberadaan Nilai Konservasi Tinggi, struktur dan komposisi vegetasi, populasi vegetasi, biota air /perikanan. Dari beberapa komponen lingkungan tersebut diambil contoh analisis pada kondisi kesuburan tanah berupa kandungan kimia tanah dan kualitas air. Analisis kesuburan tanah diperoleh hasil seperti tabel 1. berikut :

Kode	PH	C	N Tot	P tsd	K ttk	Ca ttk	Na ttk	Mg ttk	KPK	KB
	H2O	%	%	ppm	me/100 g					%
Nanas 5004	7.74	3.08	0.13	4.52	0.23	3.08	0.61	0.39	40.77	10.57
Blungun 14 a	7.78	2.02	0.1	3.24	0.15	3.81	0.65	2.04	37.92	17.54
Nglobo 42 a	8.06	2.23	0.11	4.97	0.33	4.69	0.67	0.96	43.96	15.13
Pucung 118 a	8.22	2.25	0.09	2.18	0.41	3.83	0.74	0.83	47.07	12.34
Sekaran 79 a	7.98	2.55	0.14	3.64	0.16	0.03	0.63	0.48	36.61	3.55
Ledok 97 a	7.77	1.75	0.07	7.42	0.2	4.51	0.96	0.58	54.36	11.49
Wonogadung 116a	7.87	2.55	0.18	1.85	0.19	4.28	0.55	3.03	19.58	41.16
Pasarsore 46 b	7.53	2.61	0.2	0.79	0.52	1.5	0.9	1.6	43.78	10.32
Cabak 82 b	7.75	2.26	0.13	1.5	0.16	3.64	0.69	2.56	17	41.47
Kedewan 167 b	8.15	2.43	0.13	4.7	0.15	3.46	0.55	0.46	19.55	23.63
Nglebur 116 c	6.76	2.81	0.11	5.86	0.28	2.98	0.73	2	34.8	17.21
Kendilan 35 c	8.18	3.29	0.2	2.54	0.24	3.74	0.66	0.11	46.58	10.19

Sumber : Bagian Kelola Lingkungan, PSDH KPH Cepu (2013)

Diperoleh hasil kualitas kimia tanah di wilayah KPH Cepu adalah rendah dan harus ditingkatkan lagi pengolahannya dengan tanpa menggunakan bahan kimia. Hal tersebut dikarenakan kawasan di wilayah KPH Cepu merupakan tanah yang berkapur serta titik sampel yang diambil berada di sekitar tambang minyak dan beberapa galian

batu sehingga ada aktivitas yang lain yang menimbulkan pencemaran dan pemampatan tanah sehingga mikroorganisme yang seharusnya banyak menjadi hilang adalah. Jika dibandingkan dengan dengan kriteria penilaian sifat kimia tanah pada tabel 2. berikut :

Tabel 2. Kriteria penilaian sifat kimia tanah

Sifat tanah	sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
C-Organik (%)	< 1,0	2,0	3,0	5,0	>5,0
N-Total (%)	<0,1	0,2	0,5	0,75	>0,75
P2O5HCl 25 % (ppm)	<10	20	40	60	>60
K2O.HCl 25 % (ppm)	<10	20	40	60	>60
K (%)	<0,1	0,2	0,5	1,0	>1,0
Na (%)	<0,1	0,4	0,7	1,0	>1,0
Ca (%)	<2	5	10	20	>20
Mg (%)	<0,4	1,0	2,0	8,0	>8,0
kejenuhan basa (%)	<20	35	50	70	>70
kejenuhan alumunium (%)	<10	20	30	60	>60
cadangan mineral (%)	<5	10	20	40	>40
pH sangat asam < 4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	>8,5

Sumber : Departemen pertanian, 1998

Hasil analisis pada aspek lingkungan yang mempengaruhi kesuburan tanah juga dapat dilihat dari cara penggunaan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbahnya. Jenis B3 yang digunakan tersebut umumnya berupa pupuk kimia cair dan pestisida berbahan kimia. Oleh karena itu dalam penggunaan bahan B3 yang berupa pupuk/pestisida tersebut harus mengacu pada standar yang diterapkan oleh FSC yaitu FSC Pesticide Policy : guidance on implementation. Dalam kriteria sertifikasi PHL yang dikeluarkan oleh FSC, yang mengatur tentang penggunaan B3 ini adalah pada kriteria 6.6 : “mengandung hidrokarbon klorin (*chlorinated hydrocarbon*), pestisida yang persisten, beracun atau zat turunannya akan

tetap aktif secara biologis dan terakumulasi dalam rantai makanan setelah penggunaannya, juga pestisida lain yang dilarang berdasarkan perjanjian internasional”. dan kriteria 10.7 : “Tindakan-tindakan harus diambil untuk mencegah dan meminimalkan mewabahnya hama dan penyakit, kebakaran dan introduksi tanaman invasif. Pengelolaan hama terpadu harus merupakan bagian penting dari rencana pengelolaan, yang mengandalkan metode-metode pencegahan dan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia”. Pengelolaan hutan tanaman harus berusaha untuk tidak menggunakan pestisida dan pupuk-pupuk kimia, termasuk penggunaannya dalam persemaian.

Kelola Sosial dalam Pengelolaan Hutan

Dalam analisis mengenai dampak yang berkaitan dengan kelola sosial merupakan cakupan dari seluruh komponen lingkungan hidup yang berupa sosial budaya. Komponen lingkungan sosial budaya tersebut mencakup ketenagakerjaan (kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta penerapan K3), perekonomian dan kelembagaan.

Pada tahun 2014 KPH Cepu telah memberikan kesempatan kerja kepada sekitar 540 masyarakat desa hutan /bulan. Seperti pada

prinsip FSC Kriteria 4.1 yang menyebutkan bahwa “Masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan pengelolaan hutan harus diberikan kesempatan kerja, pelatihan dan pelayanan lainnya”. Seperti terlihat pada tabel 3. data penyerapan tenaga kerja lokal dalam kawasan hutan KPH Cepu s/d Agustus Tahun 2014. Dari tabel tersebut dapat menjelaskan tentang jumlah tenaga kerja lokal dari masyarakat dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, tebangan, persemaian dan lain-lain.

Tabel 3. Data penyerapan tenaga kerja lokal dalam kawasan hutan KPH Cepu s/d Agustus Thn 2014

No	Bulan	Kegiatan (Orang)					Total
		Tanaman	Pemeliharaan	Tebangan	Persemaian	Lain-lain	
1	Januari	322	74	27	70	13	506
2	Februari	141	146	187	28	0	502
3	Maret	25	138	203	102	1	469
4	April	143	179	230	106	1	659
5	Mei	226	232	273	110	1	842
6	Juni	178	364	286	154	1	983
7	Juli	385	59	102	56	1	603
8	Agustus	425	33	103	57	1	619
9	September	414	96	15	57	1	583

Sumber : Bagian kelola sosial PSDH KPH Cepu, 2014

Kelola Produksi atau ekonomi dalam Pengelolaan Hutan

Kelola produksi ini mencakup kegiatan perekonomian masyarakat yang berupa pendapatan masyarakat dari dana sharing produksi, akses pemanfaatn lahan dan hasil hutan non kayu/ turunannya. Jumlah produksi yang besar akan memberikan manfaat secara ekonomi bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat sekitar dengan

adanya pembagian dana sharing (*cost sharing*). Pembagian sharing hasil tersebut berasal dari penjualan kayu dan non kayu selama satu tahun dan diberikan kepada masyarakat setelah kegiatan produksi selesai, seperti terlihat pada tabel 4. dana sharing untuk wilayah Kabupaten Blora.

Tabel 4. Dana sharing Wilayah KPH Cepu di Kabupaten Blora

No	Tahun	Jumlah Sharing sebelum pajak	Jumlah Sharing Bersih
1.	2004	686.120.258	644.953.042
2.	2005	1.361.497.911	1.279.808.036
3.	2006	1.983.354.407	1.864.353.142
4.	2007	2.883.333.302	2.753.583.303
5.	2008	2.490.923.663	2.440.732.047
6.	2009	2.005.089.241	1.964.743.649
7.	2010	2.842.794.003	2.785.724.368
8.	2011	1.292.809.257	1.265.762.362
9.	2012	927.950.438	907.507.411
10.	2013	1.042.734.420	1.020.403.634

Sumber: Bagian Kelola Sosial PSDH KPH Cepu, 2014

Tinjauan tentang Komitmen Manajemen

Penerapan sertifikasi baik PHL maupun CoC yang dilaksanakan di Perum Perhutani ini merupakan hasil kerjasama seluruh karyawan baik dari tingkat penentu kebijakan maupun pada tataran pelaksana. Komitmen manajemen yang ada pada KPH Cepu dan Industri Kayu I Sub Cepu dilakukan dengan mengambil beberapa parameter seperti terlihat pada tabel 5. Dari kesemua parameter tersebut diperoleh hasil terbesar adalah adanya komitmen dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan sertifikasi PHL/ CoC-FSC yaitu 4,16 dan termasuk katagori baik dari skala 5 yang diberikan. Hal tersebut menggambarkan telah diterapkannya aspek yang ada dalam komitmen manajemen yaitu *Affective commitment*, berkaitan dengan keinginan untuk terikat dengan organisasi dan merupakan *want to* dari individu; *continuance commitment*, komitmen karena kebutuhan rasional (adanya untung rugi) dan merupakan kebutuhan untuk bertahan *need to*; *Normative commitment*, merupakan norma yang dimiliki

individu dan berupa keyakinan akan tanggung jawab dan loyalitas yang merupakan kewajiban untuk bertahan *ought to* (Sopiah 2008). Dengan hasil yang demikian tersebut maka dapat dilihat kesungguhan KPH Cepu maupun industri kayu I sub Cepu dalam melaksanakan sertifikasi yaitu pada Kriteria FSC 7.3 “*Para pekerja hutan harus menerima pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan penerapan yang baik dari rencana pengelolaan*”. Pada tahun 2014 ini KPH Cepu memberikan fasilitas kepada karyawan untuk melaksanakan pelatihan antara lain pelatihan untuk mandor dan pekerja terbangun serta pelatihan monitoring, evaluasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, pelatihan survey biodiversity bagi Asper/ Kepala BKPH, KRPH dan mandor biodiversity. Komitmen manajemen yang tinggi tersebut mampu untuk lebih meningkatkan keberhasilan dari penerapan sertifikasi.

Tabel 5. Hasil analisis komitmen manajemen

No	Pernyataan	Rata-rata	Ket
1	Perlakuan manajemen terhadap penerapan sertifikasi merupakan hal penting untuk mencapai keberhasilan perolehan sertifikasi PHL/ CoC-FSC	3.94	B
2	Telah adanya alokasi Sumber daya yang memadai (SDM maupun dana) untuk penerapan sertifikasi PHL/ CoC-FSC	4.05	B
3	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap saran-saran dalam penerapan sertifikasi PHL/CoC-FSC terkait pelaksanaannya di lapangan	4.14	B
4	Sudah adanya komitmen dalam pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan sertifikasi PHL/ CoC-FSC	4.16	B
5	Karyawan sering mendapat pelatihan yang berkaitan dengan sertifikasi PHL/ CoC-FSC	3.99	B

Strategi Penerapan Sertifikasi Ekolabel

Strategi yang dapat dirumuskan terkait dengan penerapan sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani diperoleh dengan menggunakan alat analisis berupa SWOT untuk menggambarkan kondisi internal maupun eksternal kegiatan penerapan sertifikasi ekolabel.

Kondisi internal yang mempengaruhi dan menjadi kekuatan dalam penerapan sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Aspek kelola sesuai dengan pembangunan berkelanjutan

Aspek kelola yang diterapkan oleh Perum Perhutani adalah aspek kelola lingkungan, sosial dan produksi. Pada masa sebelum pengajuan sertifikasi yaitu tahun 2005 sistem kelola yang dilaksanakan hanya kelola produksi saja sehingga fokus yang dilakukan hanya terhadap keuntungan secara ekonomi perusahaan. Setelah penerapan sertifikasi PHL maka ditambahkan dengan kelola lingkungan dan kelola sosial. Kelola sosial mencakup banyak hal yaitu tentang kelembagaan masyarakat, dan sistem ketenagakerjaan. Dalam kelola lingkungan

mencakup banyak komponen yaitu pengelolaan laju erosi yang terjadi, kesuburan tanah berupa kandungan kimia tanah, debit air sungai, kualitas air sungai, laju sedimentasi, keberadaan Nilai Konservasi Tinggi , struktur dan komposisi vegetasi, populasi vegetasi, biota air /perikanan. Dari semua kelola yang dilakukan tersebut dapat menjadi suatu media untuk menunjukkan komitmen Perum Perhutani dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen manajemen yang baik

Komitmen manajemen yang telah dilaksanakan di Perum Perhutani menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk mengelola karyawan dengan baik. Dengan adanya komitmen manajemen yang meningkat maka kinerja dari karyawan juga dapat meningkat, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tertib, baik dan lancar sehingga tujuan perusahaan dalam hal ini tentang penerapan sertifikasi dapat terlaksana secara optimal. Dari hasil pendekatan dengan karyawan, dapat diketahui bahwa karyawan Perhutani memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi dalam penerapan

sertifikasi seperti terlihat pada lampiran 2. Komitmen manajemen dalam pelaksanaan sertifikasi. Kegiatan audit baik internal maupun eksternal tentang kegiatan yang sesuai dengan pelaksanaan sertifikasi juga dilakukan secara kontinyu oleh seluruh karyawan dengan baik. Dari seluruh unit manajemen yang ada di Perum Perhutani yaitu 57 unit manajemen mendapat sertifikasi PHL- FSC dan yang 50 juga mendapat sertifikat pengelolaan hutan *controlled wood*. Untuk unit manajemen yang belum mendapat sertifikasi PHL, juga diarahkan untuk dapat menerima sertifikat PHL-FSC.

Memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berisi tentang pengelolaan hutan

Kebijakan pengelolaan lingkungan merupakan satu wujud komitmen dalam pengelolaan hutan secara lestari oleh Perum Perhutani. Kebijakan tersebut mengacu pada dokumen pengelolaandan pemantauan lingkungan hidup yang berisi tentang pengelolaan hutan. Dokumen tersebut merupakan suatu gambaran tentang kondisi dan kualitas lingkungan sebagai dampak dari pengelolaan hutan. Manfaat dari adanya dokumen ini adalah : sebagai bahan informasi mengenai keadaan lingkungan areal yang dibebani perusahaan hutan, menjadi informasi mengenai dampak yang timbul dari berbagai komponen kegiatan perusahaan hutan, member masukan untuk penyusunan desain teknis rencana kegiatan perusahaan hutan, sebagai panduan dalam mengelola lingkungan hidup terhadap dampak yang ditimbulkan, sebagai informasi kepada masyarakat tentang komitmen perusahaan dalam pengelolaan hutan secara lestari, sebagai bahan perencanaan wilayah bagi pemerintah, sebagai pedoman bagi instansi lain dalam menjalankan peran membina atau memantau pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan hutan.

Kondisi internal yang mempengaruhi dan menjadi kelemahan dalam penerapan sertifikasi ecolabel di Perum Perhutani tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pimpinan kurang mengakomodasi aspirasi dari karyawan

Meskipun komitmen manajemen tinggi, akan tetapi masih ditemukan kurangnya akomodir dari pimpinan terhadap aspirasi karyawan, terutama dalam hal insentif. Seperti diketahui bahwa harga kayu yang bersertifikat lebih tinggi dibandingkan dengan harga kayu non-sertifikat, akan tetapi dalam pelaksanaan sertifikasi, karyawan belum merasakan hasil berupa insentif yang dapat me-macu semangat dan kesungguhan karyawan untuk dapat melaksanakan dan menerapkan sertifikasi yang digunakan.

SDM yang belum optimal di tingkat pelaksana teknis

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perum Perhutani khususnya KPH Cepu total ada 472 karyawan, akan tetapi untuk pelaksana lapangan hanya ada 236 orang. Dari jumlah tersebut dapat mengindikasikan bahwa dalam unit manajemen, pelaksana teknis yang ada di lapangan belum cukup banyak. Sehingga terjadi tumpang tindih tanggung jawab masih terjadi, misalnya saja mandor tanam yang ada di tiap RPH juga harus melakukan tugas untuk melakukan inventarisasi terhadap spesies flora dan fauna yang ada. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sertifikasi masih dirasakan berat oleh karyawan pada posisi pelaksana lapangan.

Kondisi eksternal yang mempengaruhi dan menjadi peluang dalam penerapan sertifikasi ecolabel di Perum Perhutani tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Penerapan skema sertifikasi standar FSC

Sertifikasi standard FSC pada dasarnya merupakan sistem sertifikasi yang pertama terbentuk tahun 1993. Dari berbagai sistem atau skema sertifikasi yang ada terdapat dua skema yang merupakan skema dengan cakupan hingga internasional, yaitu FSC dan PEFC. Yang menjadi pembeda antara keduanya adalah bahwa PEFC memberikan suatu mekanisme untuk pengenalan dan pemeriksaan skema internasional, sedangkan FSC memberikan mekanisme berupa prinsip-prinsip nasional beserta kriteria yang lebih detail, prinsipil dan dapat dipakai dimana saja di seluruh dunia. Label FSC yang diberikan pada tiap produk kayu milik Perhutani mempunyai peluang untuk dapat diterima secara mudah di pasar internasional dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu sertifikasi standar FSC menjadi pilihan bagi Perhutani.

Dukungan dari masyarakat sekitar hutan

Masyarakat sekitar hutan merupakan bagian yang tidak terlepas dari Perum Perhutani karena kawasan hutan milik Perum Perhutani berada di sekitar desa. Oleh karena itu diperlukan dukungan yang dapat menjamin kawasan hutan tersebut menunjukkan keberlanjutan. Dengan adanya sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat, akan semakin menguatkan eksistensi hutan. Sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat diharapkan mampu menjadi peluang bagi perusahaan agar keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan selalu terjaga. Masyarakat yang juga membutuhkan sumber daya yang ada di hutan dapat terlibat aktif dan berperan sebagai pengelola hutan untuk dapat menikmati manfaat sesuai dengan teori pertukaran yang dinyatakan oleh Blau

(Ndraha, 1990 dalam Supriyanto, 2008).

Kondisi eksternal yang mempengaruhi dan menjadi ancaman dalam penerapan sertifikasi ekolabel di Perum Perhutani tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kayu dan produk kayu bersertifikat tidak mendapat tempat di pasar internasional

Sertifikasi ekolabel merupakan suatu bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang sifatnya proaktif dan sukarela. Bagi produsen terdapat harapan bahwa perusahaan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan ikut serta membangun perekonomian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendapat penghargaan atas usahanya menjaga kelestarian lingkungan dengan mendapat insentif pasar. Akan tetapi pada kenyataannya adanya sertifikasi ekolabel tersebut belum mendapatkan tempat yang menjanjikan berupa pangsa pasar internasional yang jelas yang mensyaratkan kayu atau produk kayu bersertifikat. Dari banyaknya pasar kayu internasional secara umum hanya ada sekitar 20 persen saja perusahaan yang mensyaratkan label yang ramah lingkungan. Hal tersebut pada akhirnya membuat pengelola hutan seperti Perhutani dikhawatirkan menjadi mundur dari penerapan sertifikasi.

Pesatnya pertumbuhan jumlah hutan rakyat yang bersertifikat

Hutan rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan mensuplai bahan baku industri, sehingga Perhutani terancam menjadi semakin tersingkir. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi untuk dapat bekerjasama dengan pengelola hutan rakyat tersebut

Tabel 6. Matrik Analisis SWOT

INTERNAL	Strengths (S) Kekuatan	Weakness (W) Kelemahan
	a. Aspek kelola sesuai dengan pembangunan berkelanjutan b. Memiliki komitmen manajemen yang baik c. Memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berisi tentang pengelolaan hutan	a. Pimpinan kurang mengakomodasi aspirasi dari karyawan b. SDM yang belum optimal di tingkat pelaksana teknis
EKSTERNAL	Opportunities (O) Peluang	Strategi (SO)
	a. Penerapan skema sertifikasi standar FSC b. Dukungan dari masyarakat sekitar hutan	1. Kegiatan pengelolaan hutan menggunakan aspek kelola yang berkelanjutan yang disesuaikan dengan skema sertifikasi standar FSC 2. Memberikan kesempatan antara manajemen dan masyarakat sekitar hutan untuk bekerjasama
Threats (T) Ancaman	Strategi (ST)	Strategi (WT)
a. kayu dan produk kayu bersertifikat tidak mendapat tempat di pasar internasional b. pesatnya pertumbuhan jumlah hutan rakyat yang bersertifikat	1. mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk memperoleh jaringan pemasaran yang pasti di pasar internasional 2. Pimpinan sebagai top manajemen membuat kebijakan tentang kerjasama dengan pengelola hutan rakyat untuk menyediakan bahan baku bersertifikat	1. Melakukan kerjasama antara Perhutani dan masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan dalam pengelolaan hutan rakyat

Strategi yang dihasilkan adalah strategi agresif yang merupakan strategi sangat baik dan menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Organisasi tersebut memiliki kekuatan (S) dan peluang (O), sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi internal organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif

SIMPULAN

Aspek kelola Perum Perhutani yang berkelanjutan yang sesuai dengan kriteria dari sertifikasi ecolabel

- Kelola lingkungan menekankan pada dampak yang ditimbulkan antara lain berupa komponen yang berkaitan dengan kesuburan tanah (kandungan) kimia tanah, kualitas air sungai, biota air /perikanan. Analisis dampak pada kesuburan tanah menunjukkan hasil yang rendah.

- Kelola sosial antara lain mencakup ketenagakerjaan (kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta penerapan K3) dan perekonomian. Hasil analisis ketenagakerjaan menunjukkan penyerapan tenaga kerja lokal yang besar tiap bulan yaitu 540 orang /bulan. Sesuai prinsip FSC kriteria 4.1 dan kriteria 1.5.
- Kelola produksi mencakup kegiatan perekonomian masyarakat yang berupa pendapatan masyarakat dari dana sharing produksi. Analisis terhadap dana sharing yang diberikan menunjukkan jumlah yang besar untuk usaha produktif masyarakat dan bantuan fisik desa.

Faktor yang mempengaruhi implementasi sertifikasi ekolabel di KPH Cepu dan Industri kayu I Sub Cepu adalah komitmen manajemen, menunjukkan hasil tinggi pada pernyataan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan sertifikasi

REFERENSI

- Akhmad dan Rukmantara. 2009. Sertifikasi Hutan, Antara Kebutuhan dan Beban Unit Manajemen Hutan. Diunduh melalui <http://www.slideshare.net/ignoramus/sertifikasi-hutan-antara-kebutuhan-dan-beban-manajemen?related=2>. Diakses : tanggal 27 Agustus 2014
- Espinoza, O., Buehlmann, U., Smith, B., 2012. Forest certification and green building standard: overview and use in the U.S. hardwood industry. *Journal of Cleaner Production* Vol.33 (2012) p: 30-41
- FSC-SM, 2001. Forest Management P sistem Summary for : Cepu, Kebonharjo and Mantingan Forest Management Districts, Perum Perhutani Unit I, Central Java Indonesia. Annual Audit Reports FSC
- Guritno, A. D. 2000. Indonesian Forest Management Problems: What Are the Comments and Opinions of the Groups and Organizations Concerned?. *Jurnal Southeast Asian Studies*, Vol. 37
- Kaur, H. 2011b. Impact of HR Factors on Employee Attitudes: An Empirical Analysis of A Sample of ISO 14001 EMS Companies in Malaysia, *Journal of P sistem Administration and Governance* ISSN 2161-7104, 2011, Vol. 1, No. 1, 174-196.
- Martono, D., 2012. Pengertian Ekolabeling dan Penerapannya pada Industri Rotan. Artikel FORpro Vol.1, No. 1, Edisi Juli 2012
- Perum Perhutani, 2013. Laporan Tahunan Perum Perhutani. LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012
- Perum Perhutani, 2013. Sertifikasi PHL dalam <http://perumperhutani.com/kelestarian/sertifikasi-phl/> diakses tanggal 6 Juni 2014
- Perum Perhutani, 1992. Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan. Jakarta
- Rametsteiner, E. dan Simula, M., 2003. Forest certification-an instrument to promote sustainable forest management?, *Journal of Environmental Management*, Vol. 67, hal. 87-98.
- Salam, A. S. 2014. Kajian Implementasi Ekolabel pada Industri Furniture Kayu di Jepara Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang :
- Salam, A. S., Purwanto, P., Suherman, S. 2013. SVLK; Salah Satu Jenis Eco

Label untuk Mengontrol Pergerakan Kayu pada Industri Furniture di Jepara. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang

Santoso, H., 2014. Model Ekolabel Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan pada Industri Furniture di Jawa Tengah dan Daerah Istemaewa Yogyakarta. Semarang : Universitas Diponegoro

Santoso, H., Arvianto, A., Fanani, Z. 2014. Dampak Sertifikasi Ekolabel Terhadap Sustainability Industri Furnitur. Prosiding SNST Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim. Semarang

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, CV. Alfabeta, Bandung

Supriyanto, A. R. 2008. Pelibatan Masyarakat Lokal : upaya memberdayakan masyarakat menuju hutan lestari. Jurnal Penyuluh Vol. 4 No.2. ISSN : 1858-2664. Edisi September 2008.

Undang-Undang No18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Yayasan Unilever Indonesia, 2013, Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses, Yayasan Unilever Indonesia, Jakarta

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan